

BAB I

PENDAHULUAN

A. Judul

Pers dalam pemberitaan kerusuhan di Temanggung

B. Sub Judul

Analisis isi imparialitas pemberitaan kerusuhan di Temanggung, Jawa Tengah pada *Kompas* periode Februari 2011 – Maret 2011

C. Latar Belakang

Sebagai alat penyampaian informasi, media harus berhati-hati dalam menjalankan tugasnya sebagai alat kontrol masyarakat. Tahap seleksi dalam memilih atau pun menyusun berita yang layak untuk dimuat kepada publik sangatlah penting. Media mampu membangun opini publik yang nantinya memberikan pengaruh negatif atau pun positif, pro dan kontra di masyarakat. Media harus mampu bekerja tanpa melibatkan kepentingan pribadinya dan tidak menggunakan ideologinya untuk bersikap netral dalam penyampaian berita.

Antonio Gramsci memiliki pandangan mengenai realitas media (Sobur, 2006:30) bahwa “media sebagai ruang dimana berbagai ideologi direpresentasikan”. Artinya di satu sisi media menjadi sarana penyebaran ideologi penguasa, alat legitimasi dan kontrol atas wacana publik.

Tindakan anarki dalam agama belakangan ini sering kali muncul pada pemberitaan media di tanah air. Sebelum kerusakan dan pembakaran gereja di daerah Temanggung, Jawa Tengah, juga terjadi penyerangan jemaah Ahmadiyah di Cikeusik, Jawa Barat. Dalam pemberitaan yang objektif, hanya akan mengumpulkan fakta dari satu peristiwa, maka akan menjadi tidak objektif jika kedua peristiwa ini disejajarkan, namun belum diketahui kaitannya.

Kekerasan agama merupakan hal yang sangat rawan untuk diberitakan karena berhubungan dengan kelompok agama tertentu, dimana media yang meliput merupakan pemeluk dari agama yang terlibat konflik. Bagaimana media atau wartawan mampu memisahkan kepentingannya demi profesionalisme kerja, agar masyarakat memiliki penilaian sendiri dalam memandang suatu pada pemberitaan.

Dalam pemberitaan *Kompas* pada tanggal 9 Februari 2011 dengan judul “*Negara Gagal Lindungi Warga: Massa Merusak Gereja Temanggung*” menggambarkan kronologis kejadian yang dilakukan sekelompok massa yang telah memadati Gedung Pengadilan Negeri Temanggung kemudian merusak gedung pengadilan, membakar Gereja Pantekosta dan Gereja Bethel Indonesia serta merusak Gereja Katholik Santo Petrus dan Paulus, pembakaran satu unit truk Dalmas, enam unit mobil dan motor di sekitar Gereja Pantekosta, dan enam sepeda motor di lingkungan Gereja Bethel Indonesia. Peristiwa ini dilatarbelakangi oleh keputusan Pengadilan Negeri Temanggung yang telah memvonis lima tahun penjara kepada terdakwa penistaan agama yaitu Antonius Richmond Bawengan yang merupakan warga Duren Sawit, Jakarta Timur. Antonius Richmond Bawengan telah tertangkap tangan oleh warga saat menyebarkan selebaran yang berisi penistaan agama.

Pemberitaan pada awal terjadinya peristiwa kerusuhan di Temanggung pada bulan Februari 2011 mengundang berbagai reaksi sejumlah tokoh dan kelompok dari berbagai elemen. Banyak pihak yang merasa pemberitaan media hanya menyalahkan atau membenarkan pihak-pihak tertentu. Sedangkan pada bulan Maret 2011 pemberitaan berkurang dan isi pemberitaan mengenai tindak lanjut pemerintah dan penegak hukum dalam proses peradilan tersangka

kerusuhan Temanggung..

Banyaknya konflik agama yang terjadi karena adanya tujuan tertentu hal ini dikemukakan Musahadi HAM (HAM, 2007:80) “Sesungguhnya banyak dari konflik antaragama yang terjadi sepanjang sejarah umat manusia mempunyai tujuan-tujuan dan motivasi non agamawi, namun pemimpin apakah politik atau agamawi secara lihai menggunakan agama dan alasan keagamaan yang sempit untuk memobilisasi massa atau umat untuk terlibat dalam konflik tersebut”.

Dalam berbagai konflik agama, pemerintah seringkali gagal dalam memainkan perannya sebagai mediator yang adil. Tokoh agama dan lembaga keagamaan pada umumnya belum memiliki perangkat pengetahuan yang memadai tentang pentingnya proses mediasi dalam memecahkan konflik agama. Dampak dari konflik agama sungguh luar biasa kerugian yang ditimbulkan sangat besar termasuk merosotnya *social trust*.

Satu hari setelah terjadinya kerusuhan di Temanggung digelar peringatan Hari Pers Nasional ke-65. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono berpesan dalam pidatonya agar pers dalam liputannya segaris dengan tekad dan komitmen untuk memperkokoh toleransi dan mencegah aksi-aksi yang merusak kerukunan beragama (*Kompas*, 10 Februari 2011).

Pemberitaan mengenai perusakan dan pembakaran Gereja ini sangat rawan untuk diberitakan karena berhubungan dengan pihak-pihak dari tiga agama yakni Islam, Kristen dan Katolik. Selain itu pemerintah juga sebagai aktor yang menjadi subjek bagi media. Media harus jeli dalam mengemas pemberitaan dalam ini. Faktanya Forum Umat Islam Bersatu Temanggung menerbitkan buku putih karena ketidakpuasan mereka atas pemberitaan media terkait kerusuhan di Temanggung, Jawa Tengah.

Demikian dikemukakan dalam Buku Putih kronologi Kerusuhan di Temanggung pada 9 Februari 2011:

Sehubungan dengan terjadinya peristiwa kerusuhan berlatar belakang penistaan agama di Temanggung pada hari Selasa, 8 Pebruari 2011, muncullah pemberitaan di media baik elektronik maupun surat kabar yang tidak seimbang. Dalam hal ini umat Islam sangat dirugikan karena pemberitaan tersebut menempatkan umat Islam sebagai pelaku atas semua kerusuhan yang terjadi. Sehingga umat Islam Temanggung yang faktanya adalah sebagai KORBAN penistaan agama, justru menjadi pihak yang TERTUDUH.

Atas dasar kenyataan tersebut, perlu dibuat upaya pelurusan berita dengan data-data yang akurat dan obyektif baik di lapangan, maupun melalui saksi-saksi yang secara langsung melihat dan mengalami peristiwa tersebut. Maka perlu dilahirkan sebuah BUKU PUTIH untuk mengakomodasi data-data itu semua, demi menjaga ketertiban dan keamanan, khususnya di Temanggung dan sekitarnya, serta umumnya di seluruh wilayah NKRI. (<http://www.rakyatmerdeka.co.id/news.php?id=17724/> 12 Maret 2012)

Pernyataan di atas membuktikan begitu besar reaksi pemberitaan media terhadap masyarakat Indonesia yang majemuk. Imparsialitas pers yang memberitakan ini sangat diuji oleh pernyataan di atas. Oleh sebab itu penulis tertarik untuk mengetahui apakah imparsialitas diterapkan pada surat kabar harian nasional.

Media lebih ramai memberitakan kerusuhan yang disertai perusakan dan pembakaran dari pada kasus awal yang memicu terjadinya kerusuhan yakni tentang penistaan agama yang dilakukan oleh Richmon Bawengan. Oleh sebab itu peneliti lebih fokus menganalisis mengenai berita terkait kerusuhan yang terjadi di Temanggung, Jawa Tengah.

Kompas merupakan surat kabar yang mempunyai frekuensi tinggi dalam memberitakan kerusuhan Temanggung dengan dibanding dengan surat kabar harian nasional lainnya. Apabila dibandingkan dengan media nasional sejenis

yaitu *Republika* sebagai surat kabar nasional sekaligus media yang berawal dari media Islami, *Kompas* memiliki frekuensi lebih tinggi. Tingginya frekuensi pemberitaan *Kompas* menurut pengumpulan data yang dilakukan peneliti dapat dilihat dari tabel 1.1 berikut:

Tabel 1.1
Tabel Frekuensi Pemberitaan *Kompas* dan *Republika* terkait Kerusuhan Temanggung 2011

NO	Tanggal	Jumlah Judul Berita		
		<i>Kompas</i>	<i>Republika</i>	<i>Media Indonesia</i>
1.	9 Februari 2011	5	2	3
2.	10 Februari 2011	5	1	4
3.	11 Februari 2011	2	1	2
4.	12 Februari 2011	1	2	1
5.	13 Februari 2011	1	2	1
6.	14 Februari 2011	2	1	1
7.	16 Februari 2011	2		1
8.	17 Februari 2011	2	1	2
9.	18 Februari 2011	3	1	1
10.	19 Februari 2011	3	1	1
11.	21 Februari 2011	1		
12.	22 Februari 2011	1		1
13.	23 Februari 2011	1	1	
14.	24 Februari 2011	1		1
15.	2 Maret 2011	1	1	2
16.	4 Maret 2011			1
17.	7 Maret 2011	1	2	
18.	12 Maret 2011	1		
19.	15 Maret 2011	1		
20.	16 Maret 2011			1
	TOTAL	35	16	23

Sumber: Observasi peneliti pada surat kabar harian *Kompas*, *Republika* dan *Media Indonesia*

Tabel data frekuensi pemberitaan di atas menunjukkan tingginya frekuensi pemberitaan mengenai kerusuhan Temanggung pada harian *Kompas* dibandingkan dengan dua harian nasional lain di Indonesia. *Kompas* memuat 35 pemberitaan terkait kerusuhan Temanggung, sedangkan *Republika* 16 berita dan *Media Indonesia* berjumlah 23 berita. Judul terkait kerusuhan Temanggung pada harian *Republika* selebihnya berada di kolom wawancara dan opini yang mengambil argumen dari satu narasumber. Begitu pula dengan *Media Indonesia* memuat kasus ini lebih pada kolom wawancara, selain itu kurangnya pemberitaan mengenai kerusuhan di Temanggung, karena media ini tidak memiliki halaman khusus berita lokal.

Pada awal pemberitaan kerusuhan Temanggung, tanggal 9 Februari 2011, di halaman paling depan surat kabar *Kompas* memuat berita berjudul “*Dalam Kepanikan Ada Titik Solidaritas*”. Dalam pemberitaan ini *Kompas* menjumpai Ketua Komisi Antaragama dan Kepercayaan Keuskupan Agung Semarang yaitu Romo Aloysius Budi Purnomo sebagai narasumber.

Kompas merupakan surat kabar nasional yang memiliki tiras tertinggi yakni pada tahun 2004 sudah mencapai angka 509.000 (Keller, 2009:43) dan jangkauan yang luas, ditambah dengan latar belakang agama. Peneliti ingin melihat adakah aspek keberpihakan pers seperti dikemukakan oleh FUIB (Forum Umat Islam Bersatu).

Kompas didirikan pada tahun 1965, berawal dari media benuansa Kristiani yang lahir melalui inisiatif Partai Katolik (Hill, 2011: 97). Namun dalam perkembangannya *Kompas* mampu menanggalkan citranya sebagai media benuansa kristiani, bahkan mampu menjadi surat kabar dengan angka penjualan tertinggi. Dalam kebijakan redaksinya, *Kompas* tidak berpihak pada salah satu

golongan agama dan menggunakan sistem *check and balance* dalam proses pembuatan berita.

Penelitian dengan berbagai metode analisis yang mempertanyakan keobjektivitasan media massa sudah banyak dilakukan. Begitu pula mengenai penelitian yang berkaitan dengan konflik agama yang ditinjau dari imparialitas pemberitaan media. Sebagai contoh: penelitian Gabriella Pipit Lina (2012), mahasiswa Universitas Atma Jaya Yogyakarta “*Keberpihakan Pers dalam Pemberitaan mengenai pernyataan Paus Benediktus XVI tentang Islam di Kompas dan Republika*”. Dalam penelitian tersebut, dimensi *balance* dan netralitas pada teks berita di surat kabar harian *Kompas* dan *Republika* ditemukan adanya keenderungan penilaian negatif terhadap tokoh atau kelompok yang tampak dari bahasa dan kalimat yang digunakan. Pemberitaan harian *Kompas* mengenai pernyataan Paus Benediktus XVI tentang Islam lebih memihak kepada Paus Benediktus XVI. Sedangkan pada *Republika*, Paus Benediktus XVI pada pemberitaannya diasumsikan sebagai sosok yang tidak patut dipersalahkan dan diberi kecaman secara berkepanjangan. Pemberitaan yang bersifat tidak seimbang pada *Kompas* sebanyak 66,67%, sedangkan *Republika* mencapai 100% pada jangka waktu 16 September 2006 sampai dengan 2 Desember 2006 dari 33 berita yang disajikan.

Ada pula penelitian lain terkait imparialitas pada surat kabar *Kompas* yakni penelitian Widuri Permata Sari (2005), mahasiswa Universitas Petra Surabaya, “*Keberpihakan Media Cetak dalam Pemberitaan Kenaikan Harga BBM*”. Objek yang digunakan dalam penelitian adalah media cetak *Kompas* dan *Jawa Pos*. Penelitian tersebut menemukan hasil keberpihakan kedua surat kabar

tersebut kepada kepentingan rakyat, yaitu menolak kenaikan BBM. Dalam penelitian ini didapatkan tidak adanya keseimbangan *Kompas* sebesar 55%.

Peneliti kembali ingin melihat mengenai imparialitas media di Indonesia melalui kasus yang berbeda. Latar belakang berdirinya *Kompas* sebagai media bernuansa agama, sangat menarik jika diteliti imparialitasnya dalam pemberitaan mengenai konflik agama. *Kompas* selayaknya secara profesional mengutamakan obyektivitas dalam menyampaikan berita tentang kerusuhan Temanggung. Pemberitaan *Kompas* sangat menarik untuk diuji keberpihakannya terkait dengan kerusuhan Temanggung yang sangat sensitif dan berbau SARA.

D. Rumusan Masalah

Apakah imparialitas diterapkan oleh surat kabar harian *Kompas* dalam pemberitaan terkait kerusuhan di Temanggung, Jawa Tengah?

E. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui apakah imparialitas diterapkan oleh surat kabar harian *Kompas* dalam pemberitaan mengenai kerusuhan di Temanggung, Jawa Tengah.

F. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah:

F.1. Dapat dipakai sebagai acuan untuk melihat apakah imparialitas diterapkan oleh surat kabar harian *Kompas* dalam pemberitaan mengenai kerusuhan di Temanggung, Jawa Tengah.

F.2. Menjadi referensi penelitian selanjutnya dengan metode maupun tema yang sama.

G. Kerangka Teori

Penelitian mengenai imparialitas surat kabar harian *Kompas* dalam pemberitaan mengenai kerusuhan di Temanggung, Jawa Tengah ini penelitian untuk mengetahui apakah wartawan dan media benar-benar menerapkan keseluruhan unsur imparialitas dalam mengkonstruksi berita. Dalam suatu pemberitaan mengenai sebuah konflik dalam kondisi apapun wartawan harus tetap berpegang pada objektivitas, tidak boleh memihak siapapun kecuali pada kebenaran. Jika prinsip objektivitas berita dilakukan dengan benar, maka tanpa berpihak pun pemberitaan pers akan tetap menguntungkan publik atau rakyat. Jika jurnalis berpihak, maka aksesnya akan memunculkan persoalan baru. “Jurnalis akan menjadi lawan yang diberitakan dari salah satu pihak karena dianggap memusuhi satu pihak dan pihak lain” (Rahayu, 2006;133).

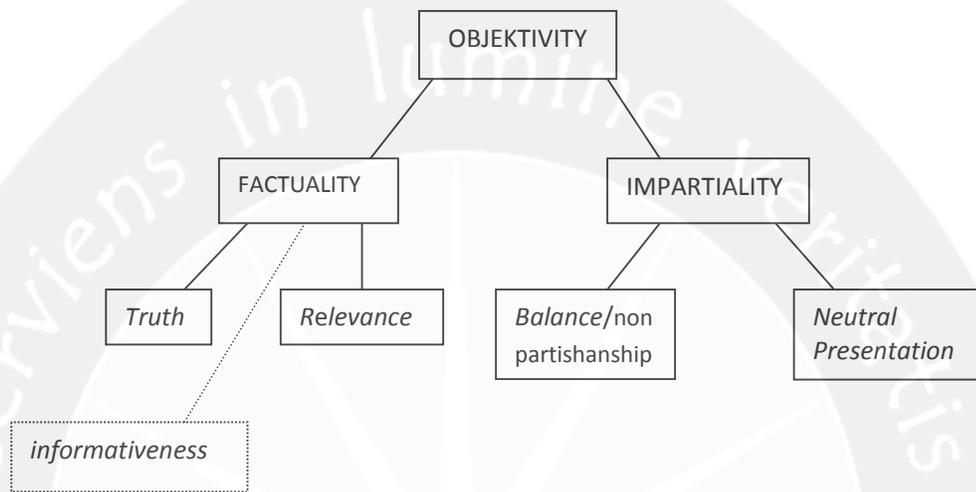
G.1 Objektivitas

Objektivitas sebagai salah satu prinsip penilaian, memang mempunyai cakupan kecil dibanding dengan prinsip yang lain. Meskipun demikian, objektivitas mempunyai fungsi terutama dalam kaitannya dengan kualitas informasi. Objektivitas juga berfungsi untuk mempertahankan kredibilitas. Kerangka konsep ini pertama kali digunakan untuk melihat kewajiban lembaga penyiaran publik Swedia untuk tidak berpihak (*impartiality*). Penelitian ini dilandasi dengan pendekatan positivistik bahwa ketidakberpihakan media massa dalam beritanya merupakan hal yang mungkin (Rahayu, 2006:8).

Memang lebih mudah menyatakan secara tegas makna yang seharusnya dikandung oleh prinsip objektivitas. Berbagai komponen prinsip itu ditampilkan oleh J. Westerstahl, ahli ilmu pengetahuan Swedia, dalam skema di bawah ini.

Skema ini mengakui bahwa penyajian laporan atau berita secara objektif harus mencakup nilai-nilai dan fakta, fakta itu sendiri memiliki implikasi evaluatif.

Gambar 1.1
Skema Objektivitas Westerstahl



(McQuail, 1992:196)

Skema objektivitas Westerstahl ini membedakan antara wilayah kognitif dengan pengamatan empiris, dan catatan serta wilayah evaluatif dengan netralitas dan keseimbangan dalam proses seleksi dan presentasi berita. Akan tetapi pada penelitian yang berfokus pada imparsialitas, penulis mengadaptasi kerangka *evaluative* dari skema objektivitas Westerstahl sebagai alat penulis untuk mengetahui apakah imparsialitas diterapkan dalam penulisan berita.

Objektivitas dalam penelitian ini mengacu pada bagaimana sebuah berita mampu dipisahkan antara opini dan fakta serta bagaimana sebuah berita mampu ada pada posisi netral sehingga nantinya berita tidak terkesan memihak kepada salah satu pihak (Rahayu, 2006:132-134). Teori mengenai objektivitas digunakan sebagai dasar pemikiran untuk melihat apakah imparsialitas diterapkan oleh surat

keberitaan *Kompas* dalam pemberitaannya mengenai kerusuhan di Temanggung, Jawa Tengah.

G.2 Imparsialitas

Imparsialitas menurut pandangan McQuail (Rahayu, 2006:10) (ketidakberpihakan) dapat dijadikan acuan penilaian dalam evaluasi sebuah berita. “Isu utama mengenai ketidakberpihakan adalah apakah teks berita secara sistematis menonjolkan satu sisi daripada yang lain ketika berkenaan dengan isu kontroversial dengan tujuan mengarahkan pembaca secara konsisten ke arah tertentu”. Imparsialitas dihubungkan dengan sikap netralitas wartawan (*reporter*), suatu sikap yang menjauhkan setiap penilaian pribadi (*personal*) dan subjektif demi pencapaian sasaran yang diinginkan. Netralitas dapat dievaluasi menggunakan kata-kata, citra dan *frames of reference*. Di dalam imparsialitas juga terdapat keseimbangan (*balance*) sebuah fakta. *Balance* berhubungan dengan seleksi atau penghilangan fakta-fakta yang mengandung nilai atau ekspresi *point of view* mengenai apa yang dianggap sebagai ‘fakta’ oleh pihak-pihak yang terkait dalam perdebatan. Menurut McQuail dalam meneliti *balance* (Rahayu, 2006:11) perlu mencari denotasi, sedangkan untuk meneliti netralitas kita perlu mencari konotasi. Dengan kata lain, sebuah informasi dikatakan objektif apabila akurat, jujur, lengkap, mengarah pada kebenaran sebuah realitas, mengandung unsur imparsialitas (*fair*) dan terpisah dari opini.

Dewan Pers (Rahayu, 2006:147) berpendapat bahwa “Imparsialitas dalam memberitakan suatu peristiwa hendaknya didasarkan pada lebih dari satu

perspektif”. Media diharuskan menampilkan informasi dari semua pihak yang terlibat sehingga pembaca mampu dengan mudah menemukan kebenaran.

McQuail berpendapat dalam kegiatan jurnalistik, keberpihakan media akan tampak untuk berpihak pada kecenderungan berafeksi positif, netral, dan negatif. Keberpihakan positif berarti media memilih sikap mendukung (*favourable*). Sedangkan sikap negatif mencerminkan sikap tidak mendukung (*unfavourable*). Dalam pemberitaan suatu mengenai konflik, media dituntut untuk tidak berpihak. Wartawan dalam menjalankan tugasnya harus mengontrol profesinya agar tidak menghasilkan liputan yang bias, tidak adil dan tidak berimbang (Rahayu, 2006:134).

Pada kerusuhan di Temanggung, Jawa Tengah ini terdapat beberapa pihak yang bertikai di dalam pemberitaannya. Apalagi konflik yang membawa nama agama sangat sensitif untuk diberitakan, karena setiap orang memiliki kepercayaan masing-masing. Jadi bagaimana wartawan menulis berita tanpa memihak pada salah satu pihak dan tidak menggunakan ideologi dalam agamanya untuk mengkonstruksi suatu realitas.

Media harus mampu mendatangkan narasumber yang tepat dan seimbang dalam memberikan keterangan ataupun argumen. Arah keberpihakan dapat dilihat dari netralitas dan *balance* atau keseimbangan dalam penggalan informasi narasumber. Kemudian tahapan seleksi argumen narasumber mana yang pantas dimuat atau tidak pantas dimuat. Informasi yang diberitakan apakah memberikan solusi atau menjadikan konflik yang baru dalam pemberitaannya.

Seiring dengan kesepakatan bahwa keberpihakan media merupakan hal yang tidak seharusnya terjadi, serta perlu adanya objektivitas dalam penulisan berita, maka imparsialitas menjadi hal yang penting. Imparsialitas dapat diukur berdasarkan *balance* atau keseimbangan dan netralitas.

G.3 Balance

Balance atau keseimbangan dalam pemberitaan menurut McQuail (Rahayu, 2006:22) adalah “elemen standar dalam pemberitaan karena melalui elemen ini posisi organisasi media yang independen ditegaskan”. Dalam suatu pemberitaan sesuai dengan ilmu jurnalistik ada dua jenis *balance* yakni *internal balance* dan *eksternal balance*. Pada *internal balance* melihat keseimbangan pada sebuah teks. Sedangkan dalam *eksternal balance* melihat keseimbangan dari beberapa item atau program berita dalam satu jenis media. Namun dalam melihat arah keberpihakan memfokuskan pada *internal balance* melihat keseimbangan proses seleksi berita.

Menurut McQuail, *Balance* diukur berdasarkan tiga elemen (Rahayu, 2006:22-23) :

Pertama, ada atau tidaknya *source bias* yang dapat dilihat dari ketidakseimbangan sumber berita yang dikutip dalam peliputan antara yang pro (setuju) atau kontra (tidak setuju). Untuk dapat mengukur *source bias* dapat dilihat dari tiga kategori sisi peliputan, yaitu satu sisi, dua sisi dan multi sisi. Pemberitaan dikatakan menggunakan satu sisi peliputan jika di dalamnya hanya menampilkan salah satu pihak saja atau dari berbagai pihak namun satu pendapat. Pemberitaan dikatakan mempunyai dua sisi peliputan jika di dalamnya

menampilkan kedua belah pihak. Peliputan dinilai mempunyai multi sisi peliputan jika pada suatu berita menampilkan berbagai sisi pihak dan pendapat yang memungkinkan berita lebih objektif. *Source bias* merupakan cara untuk melihat kecondongan suatu media. *Kedua*, ada atau tidaknya *Slant* atau kecenderungan pemberitaan media terhadap nilai-nilai tertentu. *Slant* biasanya dapat dilihat dari adanya kalimat atau kata pujian atau pun kritikan sebagai bentuk kecondongan media pada nilai-nilai tertentu. *Ketiga*, ada atau tidaknya ketidakseimbangan pemberitaan. Biasanya ketidakseimbangan terjadi pada berita-berita kontroversial yang mengandung muatan pro kontra .

G.4 Netralitas

Netralitas merujuk pada pemikiran McQuail (Rahayu, 2006:24) lebih berkaitan dengan aspek presentasi berita. Dimensi netralitas ialah penempatan, keutamaan relatif *headlining*, dan pilihan kata. Namun dalam analisis isi hanya dilihat dari aspek pemakaian kata yang dapat menimbulkan sensasionalisme dan emosionalisme. Di samping itu juga ditambahkan aspek *stereotypes* dan dua aspek penulisan berita yakni *juxtaposition* dan *linkage*.

a. Sensasionalisme

Sensasionalisme dapat diartikan sebagai sifat suka menimbulkan sensasi. Tujuannya adalah untuk menarik perhatian orang lain. Merujuk pada pemikiran McQuail (Rahayu, 2006: 24-25) untuk mengukur sensasionalisme sebuah berita menggunakan tiga indikator yaitu: *Pertama*, ada atau tidaknya personalisasi yaitu pandangan yang melihat individu tertentu sebagai aktor utama atau tunggal yang

paling berpengaruh dalam sebuah peristiwa. Personalisasi diukur dengan kategori yang ditentukan peneliti antara lain; Ada tidaknya personalisasi dari badan pemerintahan (eksekutif, legislatif, yudikatif), personalisasi dari tokoh agama, personalisasi dari aparat keamanan, personalisasi dari pihak lain yang dapat disebutkan dalam berita. Pemilihan kategori tersebut dibuat berdasarkan profesi narasumber berita dari *Kompas* yang muncul dalam kerusuhan di Temanggung, Jawa Tengah 2011. *Kedua*, ada tidaknya penonjolan aspek emosi dalam pemberitaan atau emosionalisme. *Ketiga*, ada tidaknya dramatisasi atau keterangan yang bersifat hiperbolik yang menimbulkan efek dramatis pembacanya.

b. *Stereotype*

Stereotype menurut McQuail (Rahayu,2006:26) berarti “pemberian atribut tertentu terhadap individu atau kelompok atau bangsa tertentu dalam penyajian sebuah berita. *Stereotype* dapat menjadikan individu atau kelompok tertentu dalam berita sering dipersepsi dan diperlakukan berdasarkan atribut mereka”. *Stereotype* baik yang bermakna positif ataupun negatif mengundang keberpihakan wartawan atau media.

c. *Juxtaposition*

Juxtaposition jika merujuk pada pemikiran McQuail (Rahayu, 2006: 26) dapat diartikan “menyandingkan dua hal yang berbeda”. Aspek ini digunakan wartawan untuk menyandingkan dua fakta yang berbeda dengan maksud menimbulkan efek kontras yang pada akhirnya menambah kesan dramatis berita yang disajikan. *Juxtaposition* dapat mengubah atau menggeser pemaknaan dua

fakta yang sebenarnya berbeda atau tidak berhubungan menjadi sama atau berhubungan.

Menurut pemikiran McQuail (Rahayu, 2006:76) *Juxtaposition* dapat terjadi karena latar belakang informasi yang kurang memadai, penarikan kesimpulan yang terburu-buru oleh jurnalis, dan keinginan yang sangat kuat untuk mendapatkan efek tertentu dalam pemberitaan sehingga mengabaikan prinsip penghubungan dua fakta yang relevan.

d. *Linkage*

Linkage berdasarkan pemikiran McQuail (Rahayu, 2006: 26) adalah “menyandingkan dua fakta yang berlainan dengan maksud untuk menimbulkan efek asosiatif”. Menurut McQuail hal ini bertujuan untuk membangun kesatuan atas keragaman atau dapat juga membangun *mood* tertentu. Wartawan menggunakan *linkage* untuk menghubungkan dua fakta yang sebenarnya berbeda sehingga kedua fakta tersebut dianggap (diasosiasikan) memiliki hubungan sebab-akibat.

Teori di atas digunakan sebagai dasar pemikiran untuk melihat imparisialitas surat kabar *Kompas* dalam pemberitaannya mengenai kerusuhan di Temanggung, Jawa Tengah. Seiring dengan adanya asumsi bahwa ketidakberpihakan dalam berita adalah mungkin. Kesepakatan bahwa keberpihakan media merupakan hal yang tidak seharusnya terjadi, serta perlu adanya objektivitas dalam penyajian berita oleh surat kabar. Dalam hal ini pula skema objektivitas secara *evaluative impartiality* dipakai untuk melihat ketidakberpihakan media.

H. Kerangka Konsep

Peneliti membatasi objek penelitian pada pemberitaan terkait Kerusuhan di Temanggung, Jawa Tengah pada surat kabar harian *Kompas*. Pengertian pemberitaan (*Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 2008:179) ialah “proses, cara, perbuatan memberitakan atau menceritakan, mengabarkan mengenai kejadian atau peristiwa”. Berita menurut pandangan Fishman (Eriyanto, 2007:100) bukanlah refleksi atau distorsi dari realitas yang seakan berada di luar sana. Selain itu, dia juga beranggapan bahwa ada dua kecenderungan studi bagaimana proses produksi berita dilihat. Pandangan pertama menurut Fishman, yaitu pandangan seleksi berita (*selectivity of news*). Proses seleksi ini dimulai dari wartawan yang meliputi peristiwa di lapangan, wartawan akan memilih mana yang penting dan mana yang tidak, peristiwa mana yang perlu diberitakan dan tidak diberitakan. Kemudian berita berlanjut ke tangan redaktur, dimana berita itu akan diseleksi lagi dan disunting dengan menekankan bagian mana yang perlu dikurangi dan bagian mana yang perlu ditambah.

Pandangan kedua menurut Fishman (Eriyanto, 2007:101) adalah pandangan pembentukan berita (*creation of news*). Sesuai dengan pandangan ini, peristiwa bukan diseleksi melainkan dibentuk oleh wartawan. Berita yang dihasilkan oleh wartawan berasal dari pengetahuan dan pikiran, bukan sekedar realitas objektif yang ada di masyarakat tetapi karena orang akan mengorganisasikan dunia yang abstrak ini menjadi dunia yang koheren, beraturan dan mempunyai makna. Bagaimana wartawan mempersepsi peristiwa/fakta yang akan diliput menjadi tahap awal dalam proses produksi berita.

Berita merupakan hasil akhir dari proses yang kompleks dengan menyortir (memilah-milah) dan menentukan peristiwa dan tema-tema dalam satu kategori berita (Eriyanto, 2007:101). Bagaimana proses produksi berita, bisa kita lihat dari: rutinitas organisasi, terdapat banyak faktor yang menentukan kenapa peristiwa tertentu dihitung sebagai berita sementara peristiwa yang lain tidak, aspek tertentu dari peristiwa lebih ditonjolkan sementara aspek lain tidak ditonjolkan bahkan sengaja dihilangkan. Proses memilah-milah tersebut terjadi dalam suatu rutinitas kerja keredaksionalan, yaitu suatu bentuk rutinitas organisasi.

Peristiwa yang dimaksud dalam penelitian ini adalah peristiwa yang memiliki kaitan dengan kerusuhan berupa perusakan dan pembakaran tiga gereja di Temanggung yang terjadi pada tanggal 8 Februari 2011. Melalui pemberitaan dalam peristiwa ini, peneliti ingin melihat imparialitas pers yaitu *Kompas*.

Konflik antar agama menurut Musahadi (HAM, 2007:80) adalah “konflik antar kelompok pemeluk agama yang berbeda dengan alasan non agama (misalnya politis, ekonomi, sosial) dan juga menggunakan dalil atau tujuan agama yang sempit atau bahkan salah”. Pemerintah sebagai lembaga non partisan yang diharapkan mampu meredam konflik tersebut dalam kenyataannya tidak cukup produktif dalam menghentikan berbagai konflik yang menelan banyak korban. Konflik agama pada umumnya sulit untuk diselesaikan karena ia melibatkan sentiment psikologis yang mudah meluas sebagai konsekwensi logis keberadaan agama yang pada umumnya menempati ranah psikologis manusia yang paling dalam.

Penelitian ini didasari oleh asumsi Westertahl bahwa ketidakberpihakan dalam berita adalah mungkin, bahkan sekaligus dimungkinkan dengan membandingkan siaran lembaga penyiaran yang dianggap netral mengenai isu kontroversial dengan saluran berita lainnya seperti kantor berita atau koran.

Dewan Pers dan Staf Peneliti di Pusat Kajian Media dan Budaya Populer (Rahayu, 2006:149) berpendapat bahwa “Imparsialitas dalam memberitakan suatu peristiwa hendaknya didasarkan pada lebih dari satu perspektif”. Media diharuskan menampilkan informasi dari semua pihak yang terlibat sehingga pembaca mampu dengan mudah menemukan kebenaran.

Keberpihakan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2008:1071) ialah “hal berpihak (memilih, mengikuti, membela salah satu pihak). Dalam kamus komunikasi (Effendi, 1989:200) pers sendiri memiliki arti dalam pengertian khusus yaitu media massa komunikasi cetak yang mengelola pemberitaan”. Surat kabar harian sebagai objek penelitian kali ini yaitu surat kabar yang terbit setiap hari. Penelitian ini dilakukan untuk mengukur imparsialitas pemberitaan di surat kabar harian *Kompas* dalam memberitakan kerusuhan di Temanggung, Jawa Tengah. Penelitian pada bulan Februari 2011 hingga Maret 2011.

Penelitian ini dilakukan dengan metode Analisis Isi. Analisis isi pada penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif teks media. Analisis akan dilakukan dengan membuat unit analisis dan kategorisasi penelitian untuk mengukur imparsialitas berdasarkan model objektivitas Westertahl sebagai berikut.

Tabel 1.2
Unit Analisis dan Kategori berdasarkan Teori Objektivitas Westertahl

Dimensi Imparsialitas	Unit Analisis	Kategori		Sub Kategori
<i>Balance</i>	<i>Source bias</i>	Berhubungan dengan tipe liputan		a. Satu sisi b. Dua sisi c. Multi sisi
	<i>Slant</i>	Penilaian negatif atau kritikan		a. Ada b. Tidak ada
		Penilaian atau pujian		a. Ada b. Tidak ada
	Ketidakseimbangan berita	Keseimbangan porsi alinea dalam rangkaian berita		a. Ada b. Tidak ada
Netralitas	Sensasionalisme	Personalisasi yaitu pandangan yang melihat individu tertentu sebagai aktor utama yang berpengaruh dalam sebuah peristiwa	Personalisasi dari badan pemerintahan (eksekutif, legislatif, yudikatif)	a. Ada b. Tidak ada
			Personalisasi dari tokoh agama	a. Ada b. Tidak ada

		Personalisasi dari aparat keamanan	a.Ada b.Tidak ada
		Personalisasi dari pihak lain, selain disebut di atas	a.Ada b.Tidak ada
		Emosionalisme yaitu penonjolan aspek emosi dalam pemberitaan	a.Ada b.Tidak ada
		Dramatisasi atau keterangan yang bersifat hiperbolik yang menimbulkan efek dramatis	a.Ada b.Tidak ada
	<i>Stereotype</i>	Pemberian atribut tertentu pada kelompok, individu, atau bangsa dalam teks berita	a. Ada b.Tidak ada
	<i>Juxtaposition</i>	Penyandingan berita berupa perbandingan.	a. Ada b.Tidak ada
	<i>Linkage</i>	Penyandingan berita ber-beda dengan hubungan sebab-akibat	a. Ada b.Tidak ada

I. Definisi Operasional

Berikut ini merupakan unit-unit analisis yang digunakan oleh peneliti untuk menilai imparisialitas dengan mengacu pada pemikiran Denis McQuail dalam buku *Media Performance*. Unit-unit analisis ini didefinisikan sebagai acuan pengukuran imparisialitas media mengenai pemberitaan kerusuhan di Temanggung pada surat kabar harian *Kompas*.

Imparsialitas media menurut pemikiran McQuail mengacu pada keseimbangan (*balance*) dan netralitas. Maka untuk mengukur imparisialitas berita kedua dimensi tersebut diukur dengan menggunakan unit analisis yang sudah dikategorikan, kemudian nantinya akan ditemukan pada objek penelitian yaitu surat kabar harian *Kompas* terkait pemberitaan mengenai kerusuhan Temanggung.

1. *Balance*

Dalam analisis isi menurut pandangan McQuail (Rahayu, 2006:22) *balance* diukur dengan “menghitung berapa banyak ruang dan waktu yang diberikan media untuk menyajikan pendapat atau kepentingan salah satu pihak. Selain itu untuk mengevaluasi menggunakan *prominence*, *linkage*, *sequence* yang mengimplikasikan adanya pengarahan (*direction*) ataupun penilaian (*valuation*)”. Model ini melihat semua fakta, objek, dan peristiwa memiliki makna yang telah terberi (*given*) dan secara tidak langsung memiliki penilaian (positif, netral, negatif) melalui dua cara yakni aspek seleksi dan sebagai aspek evaluasi.

Untuk mengetahui ada atau tidaknya *source bias* dalam sisi peliputan, penelitian dilakukan dengan melihat sisi peliputan suatu berita yakni satu sisi, dua

sisi atau multi sisi. *Source bias* bisa terjadi jika hanya menggali informasi hanya dari satu narasumber, padahal sumber lain memungkinkan berita memiliki perspektif yang mendalam. *Sources bias* juga dapat terjadi jika wartawan tidak melakukan kroscek secara langsung terhadap sumber-sumber berita yang relevan. Contoh pemberitaan mengandung *source bias* yakni dalam berita berjudul “*Imbas Merapi, Petani Gurami Rugi Ratusan Juta*” (*Kedaulatan Rakyat*, 24 Mei 2011). Dalam pemberitaan ini hanya terdapat informasi dari satu sisi yakni warga pemilik kolam gurami yang dia sendiripun tidak tahu benar berapa total kerugian setelah terkena imbas merapi. Selain itu tidak ada narasumber pendukung akan kebenaran informasi tersebut.

Slant diukur dari ada atau tidak penilaian negatif atau kalimat kritikan dari penulis berita, ada atau tidak penilaian positif berupa kata atau kalimat pujian yang ditemui dalam teks berita yang secara spesifik berasal dari media itu sendiri (wartawan, editor) dan bukannya dari narasumber. Sebagai contoh berita “*Dewan Siap Tampung Keluhan Soal RSBI*” (*Kedaulatan Rakyat*, 24 Mei 2011).

DEWAN SIAP TAMPUNG KELUHAN SOAL RSBI

DPRD Kabupaten Magelang melalui Komisi D siap menerima aspirasi masyarakat terkait persoalan Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI). Tak hanya itu, mereka juga siap menjembadani dan membantu masyarakat bila menemui permasalahan terkait penyelenggaraan RSBI di Magelang.

Kutipan berita di atas menggunakan kalimat pujian yang ditujukan kepada DPRD Kabupaten Magelang karena siap menerima aspirasi masyarakat terkait persoalan Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI). Selain itu juga siap menjembadani dan membantu masyarakat bila menemui permasalahan terkait

penyelenggaraan RSBI di Magelang. Padahal memang sudah menjadi tanggung jawab DPR atau pun DPRD menjadi lembaga yang menampung aspirasi rakyat dan menjembatani aspirasi rakyat kepada pemerintah. Maka dalam berita di atas ditemukan *slant* karena ditemukan adanya kalimat pujian yang dibuat penulis berita.

Ketidakseimbangan mengambil bentuk ketidakseimbangan fakta maupun pihak-pihak yang menjadi narasumber dengan melihat porsi alinea dalam berita yang bermuatan pro dan kontra, dan evaluasi positif dan negatif yang datang dari medianya atau pun kutipan narasumber. Seperti yang diungkapkan dalam “Menyingkap Profesionalisme Kinerja Surat Kabar di Indonesia” (Rahayu, 2006:23) bahwa tugas wartawan dalam pemberitaan kontroversial atau yang mengandung pro dan kontra ialah menampilkan perbedaan pendapat secara seimbang. Dalam hal ini wartawan harus mampu menjaga keseimbangan dalam proses seleksi fakta-fakta yang ditampilkan, bukan untuk mencari siapa yang salah atau yang benar.

Keseimbangan sangat penting dalam pemberitaan terkait yang berbau kontroversi dalam agama. Contohnya dalam pemberitaan “*DPR Dinilai Tebar Teror Baru kepada KPK*” (*Kompas*, 14 Oktober 2011). Dalam pemberitaan ini media merepresentasikan bahwa DPR mengancam KPK yang diumpamakan sebagai teror dan tidak menyetujui langkah KPK untuk memberantas korupsi. Sebagian besar porsi alinea merupakan kritikan kepada DPR untuk mematuhi yang diumpamakan sebagai teror dan tidak menyetujui langkah KPK untuk memberantas korupsi. Sebagian besar porsi alinea merupakan kritikan kepada

DPR agar mematuhi perundangan terkait korupsi. Empat dari lima alinea mengungkapkan argumen negatif terhadap DPR. Maka dalam pemberitaan di atas ada ketidakseimbangan berita.

2. Netralitas

Dalam netralitas penggunaan kata-kata menjadi hal dasar dalam penelitian ini. Melalui pengamatan akan penggunaan kata-kata yang tersusun dalam kalimat, peneliti bisa melihat penilaian pers *Kompas* terhadap pihak-pihak tertentu. Menurut McQuail, bila pada keseimbangan dapat dilihat dengan jelas pada berita, namun aspek netralitas dapat dipahami bila keseluruhan berita bisa dimengerti (Rahayu, 2006:75). Pada penelitian ini, netralitas diukur berdasarkan empat hal yaitu sensasionalisme, *stereotype*, *juxtaposition*, dan *linkage*.

Pertama, sensasionalisme sebagai indikator untuk mengukur netralitas dapat diukur dengan melihat ada atau tidaknya personalisasi dalam judul atau pun isi berita yakni pandangan yang melihat individu tertentu sebagai aktor utama atau tunggal yang paling berpengaruh dalam sebuah peristiwa. Dalam mengukur personalisasi peneliti memberikan kategorisasi; ada atau tidaknya personalisasi dari badan pemerintahan (eksekutif, legislatif, yudikatif), ada atau tidaknya personalisasi dari tokoh agama, ada atau tidaknya personalisasi dari aparat keamanan, dan ada atau tidaknya personalisasi dari pihak lain yang disebutkan dalam berita. Pemilihan kategori tersebut dibuat berdasarkan narasumber berita dari *Kompas* yang muncul dalam kerusuhan di Temanggung, Jawa Tengah 2011. Selain itu, ada atau tidaknya emosionalisme pada judul dan isi berita yakni penonjolan aspek emosi (suka, benci, sedih, gembira, marah, dan sebagainya)

dibandingkan aspek logis rasional dalam penyajian sebuah berita. Kemudian ada atau tidaknya dramatisasi pada judul dan isi berita yakni bentuk penyajian atau penulisan berita yang bersifat hiperbolik dan melebih-lebihkan sebuah fakta dengan maksud menimbulkan efek dramatis bagi pembacanya. Sebagai contoh pemberitaan “*Petani Miskin Yang Semakin Miskin*” (*Kompas*, 14 Oktober 2011).

Penderitaan Munadi(60) buruh tani yang tinggal di Blok Cikuya RT 001 RW 09, tepatnya di belakang komplek Perkantoran Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, di Desa Sumber, semakin lengkap. Ayah tujuh putera tersebut nyaris kehilangan semua miliknya. Bukan hanya harta, melainkan juga jiwa raganya.

Ia curiga jangan-jangan blok persawahan itu bakal disulap menjadi perumahan.

Dalam kutipan berita di atas menggunakan personalisasi petani yang mendominasi peristiwa dalam berita. Dramatisasi pada judul berita yang menimbulkan efek kesedihan pada pembacanya. Pemerintah menjadi aktor utama yang harus bertanggung jawab karena lahan petani dijadikan perumahan menggunakan kata “disulap” yang menimbulkan efek dramatisasi atau berlebihan.

Kedua, stereotype sebagai indikator untuk mengukur netralitas yang dapat dilihat dalam pemberitaan yang menjadikan individu, kelompok, atau bangsa memiliki asosiasi yang negatif atau pun positif. *Stereotype* wajar ada dalam pemberitaan namun bukan berarti diperbolehkan untuk dimasukkan dalam pemberitaan. *Stereotype* biasanya terjadi bila wartawan mengabaikan kondisi sosio kultural masyarakat (Rahayu, 2006:76). *Stereotype* dalam penelitian ini diukur berdasarkan ada atau tidaknya *stereotype* dalam pemberitaan.

Stereotype bisa dilihat dari pemberian atribut kepada individu, kelompok, atau bangsa pada berita. Sebagai contoh “*Jangan Ulangi Pulau Sipadan-*

Ligitan" (*Kompas*, 14 Oktober 2011).

Informasi pergeseran patok di Camar Bulan dan Tanjung Datu di Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat, hanyalah puncak gunung es dari karut-marutnya masalah perbatasan di negeri yang sudah merdeka 66 tahun ini.

Dalam kutipan di atas ditemukan kalimat yang menunjukkan bahwa Indonesia merupakan negara 'karut-marut' yang berujung menggunakan perumpamaan 'puncak gunung es' dengan permasalahan perbatasan. Hal ini merupakan stereotip negative terhadap bangsa.

Ketiga, *juxtaposition* sebagai indikator untuk mengukur netralitas mempunyai ciri-ciri yakni menyandingkan dua hal yang berbeda. *Juxtaposition* bisa dilihat dengan adanya kontras pertarungan antara dua dunia yang berbeda dengan fenomena yang berbeda.

PAUS MINTA MAAF

Kutipan Teks Abad Pertengahan Tak Cerminkan Pendapatnya

...

Tidak bisa tidak, masyarakat menilai perbedaan antara Paus Benediktus XVI dan pendahulunya, Paus Yohanes Paulus II. "Saya lebih respek pada pernyataan Paus Yohanes Paulus II," kata Hasyim. (*Kompas*, 18 September 2006)

Dalam kutipan di atas disandingkan dua fakta dari dua periode kepemimpinan yakni Paus Benediktus dan Paus Yohanes Paulus.

Linkage sebagai indikator untuk mengukur netralitas, dapat dilihat dari pemberitaan yang menyandingkan dua fakta yang berbeda untuk menimbulkan efek asosiatif yang memiliki hubungan sebab-akibat.

Sebagai contoh dalam pemberitaan “*Peringati Bulan Bung Karno, PDIP Malah Bentrok*” (*Kedaulatan Rakyat*, 24 Juni 2011).

Dua massa PDIP Kabupaten Magelang, ribut ditengah-tengah peringatan Bulan Bung Karno di Gedung Panti Marhen, Prumpung, Muntilan, Jumat (24/6). Keributan terjadi antar massa pendukung mantan Sekretaris DPC PDIP yang sudah diberhentikan Susilo, dengan puluhan satgas PDIP setempat. Beruntung, aparat kepolisian dan TNI dapat mengendalikan keributan.

Keributan ditenggarai akibat konflik internal di tubuh DPC PDIP setempat, usai pemilu 2009 lalu. Puncaknya saat pemilihan Ketua DPRD Kabupaten Magelang periode 2009-2013. Saat itu, rekomendasi DPP PDIP bukan atas nama Susilo, tapi menyebut nama lain. Namun Susilo tetap terpilih karena mendapat dukungan anggota DPRD yang lainnya.

Dalam contoh berita di atas terdapat dua peristiwa yakni yang pertama bentrok massa PDIP dan kedua pemilihan Ketua DPRD Kabupaten Magelang periode 2009-2013. Kedua fakta tersebut dihubungkan karena dianggap memiliki hubungan sebab-akibat.

Terkait pemberitaan kerusuhan di Temanggung, Jawa Tengah ada beberapa pihak yang kemudian memberikan pendapat baik dari pihak korban atau pun pelaku dalam hal ini ditujukan pada kelompok yang berbeda agama. Informasi dan tanggapan tersebut nantinya akan dirangkum menjadi berita. Penelitian ini dilakukan dengan melihat bagaimana *Kompas* memilih informasi yang relevan dan merangkumnya menjadi berita. Peneliti menganalisis sesuai dengan teori dan operasionalisasi yang sudah ditentukan oleh peneliti.

J. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis isi (*content analysis*). Denis McQuail membuat dikotomi dalam riset *content analysis*

media dalam dua tipe (Rahayu, 2006: 33) yaitu: *message content analysis* dan *structural analysis of texts*. Sedangkan analisis isi termasuk dalam *message content analysis* yang memiliki karakteristik *quantitative, fragmentary, systematic, generalizing, extensive, manifest meaning, dan objective*. Untuk menilai kualitas berdasarkan objektivitas pemberitaan McQuail menggunakan *message content analysis*, metode ini digunakan untuk menilai kualitas berita di surat kabar. Penilaian dilakukan pada sejumlah item berita surat kabar dengan mengacu pada *instrument* pengukuran yang memuat dimensi-dimensi kualitas berita yang telah diterapkan sebelumnya berdasarkan hasil pengajian teoritik tentang *performance* media.

Metode *content analysis* menurut Holsti (Rahayu, 2006:33), “adalah suatu teknik untuk mengambil kesimpulan dengan mengidentifikasi berbagai karakteristik khusus suatu pesan secara objektif, sistematis dan generalis”. Berelson mendefinisikan analisis isi (Krippendorff,1991:16) sebagai “teknik penelitian untuk mendeskripsikan secara objektif, sistematis dan kuantitatif isi komunikasi yang tampak (*manifest*)”.

Analisis isi menampilkan objektivitas yakni jika penelitian ini dilakukan oleh peneliti lain maka akan menemukan hasil yang sama. Generalis artinya penemuan harus memiliki referensi teoritis. Informasi yang didapat dari analisis isi dapat dihubungkan dengan atribut lain dari dokumen dan mempunyai relevansi teoritis yang tinggi. Sedangkan secara sistematis artinya penetapan isi atau kategori dilakukan peneliti menurut aturan yang diterapkan secara konsisten yakni meliputi perumusan pertanyaan, memilih sumber data, membuat kategori

yang digunakan dalam analisis, kemudian melakukan pengkodean data yang nantinya akan didapatkan hasil untuk membuat kesimpulan. Peneliti mengumpulkan data yang terdokumentasi, dalam penelitian ini mengambil teks berita pada surat kabar *Kompas* yang nantinya mampu diukur menggunakan alat ukur kuantitatif menggunakan rumus yang sudah ditentukan.

Dalam mengukur imparialitas yang merupakan aspek penilaian dalam menilai kualitas berita, maka ditentukan unit-unit analisis yang membatasi penelitian ini. Penelitian ini dilakukan menyangkut pesan yang bersifat *manifest* atau mengenai isi pesan komunikasi yang tampak berdasarkan yang tercetak dalam media massa bersangkutan dan kuantitatif atau analisis berdasar data dan angka. Dalam penelitian analisis isi ini peneliti menggunakan media surat kabar *Kompas* untuk menilai netralitas dan keseimbangan berita dalam mengungkap kerusuhan di Temanggung, Jawa Tengah.

2. Populasi dan sampel

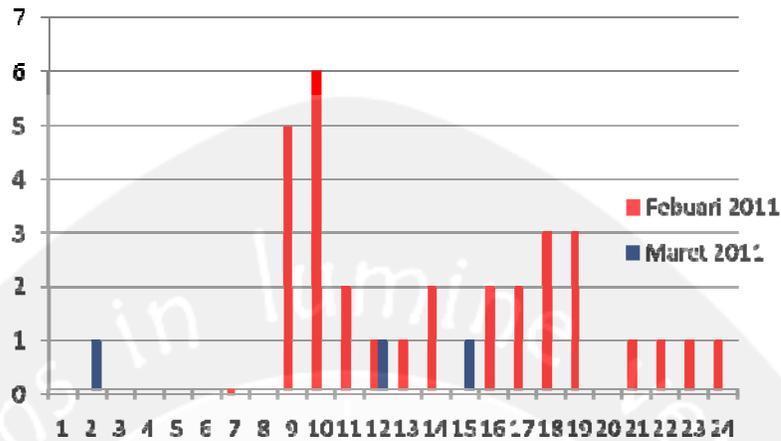
Populasi dalam penelitian ini adalah semua berita terkait kerusuhan di Temanggung, Jawa Tengah dalam surat kabar harian *Kompas* pada masa 9 Februari 2011 sampai dengan 24 Februari 2011 dan pada tanggal 2 Maret 2011 sampai dengan 15 Maret 2011 baik pada halaman utama, politik dan hukum, umum, dan nusantara pada harian *Kompas*. Jumlah teks berita terkait kerusuhan di Temanggung, Jawa Tengah pada harian *Kompas* terdapat 35 berita.

3. Jenis Data

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan mengumpulkan data yang saling mendukung dan berhubungan satu sama lain, yaitu:

a) Data Primer : Perolehan data primer atau data yang diperoleh dari sumber primer yakni sumber asli yang memuat informasi atau data (Amrin, 1995:132) dilakukan dengan mendokumentasikan berita-berita dari surat kabar harian *Kompas* periode Februari 2011 sampai dengan Maret 2011, disebabkan adanya frekuensi pemberitaan terkait kerusuhan Temanggung hanya pada bulan Februari 2011 hingga Maret 2011. Data primer dibagi menjadi dua periode berdasarkan tingkat intensitas pemberitaan yakni tanggal 9 Februari 2011 sampai dengan 24 Februari 2011 yang berjumlah 32 berita dan pada tanggal 2 Maret 2011 sampai dengan 15 Maret 2011 yang berjumlah 3 berita. Hal ini dengan pertimbangan bahwa berita konflik merupakan berita yang tidak dapat diduga oleh media, maka dalam peliputannya kesiapan media dalam pencarian informasi sangat diperhitungkan. Jumlah total berita terkait kerusuhan Temanggung di surat kabar *Kompas* yakni 35 berita, keseluruhan berita merupakan *hard news* baik yang terletak di halaman utama atau pun halaman hukum dan politik. Fluktuasi pemberitaan terkait kerusuhan Temanggung di surat kabar *Kompas* sebagai berikut.

Diagram 1.1
Fluktuasi Pemberitaan Terkait Kerusuhan Temanggung di Surat Kabar Harian
Kompas Februari 2011- Maret 2011



Sumber: observasi peneliti pada Surat Kabar Harian Kompas Februari - Maret 2011

- b) Data Sekunder : Data Sekunder atau data yang diperoleh dari sumber yang bukan asli (Amrin, 1995:132) pada penelitian ini berupa dokumentasi yang telah ada maupun laporan yang telah tersedia. Pada penelitian ini studi pustaka menjadi acuan data sekunder sebagai referensi maupun sumber informasi pokok. Data skunder yang digunakan peneliti antara lain; buku referensi teori sebagai acuan penelitian, penelitian sebelumnya terkait objektivitas media, surat kabar harian terkait penelitian, dan sumber dari internet terkait kerusuhan Temanggung.
- c) Data interkoder atau *coding sheet*: Berisikan daftar pertanyaan yang dibuat berdasarkan indikator-indikator atau kategorisasi dari *variable* penelitian yang harus direspon oleh *intercoder*. Isi sesuai dengan unit analisis yang telah direncanakan mengenai *balance* dan *neutrality*.

3. Pengkodingan

Metode yang dilakukan untuk menganalisis data yang telah dikumpulkan yakni dengan melakukan pengkodingan dengan cara memasukkan data ke dalam

lembar koding atau data dari daftar pertanyaan ke daftar yang memberikan informasi yang disebut daftar *code* atau *code sheet* sesuai dengan kategorisasi yang telah ditentukan. Pengkodingan dilakukan oleh dua orang atau lebih pengkoding yang telah berpengalaman dan mengetahui *issue* yang tengah diteliti agar hasilnya menjadi akurat. Proses pengkodingan teks berita dilakukan berdasarkan batasan definisi operasional yang telah ditentukan. Masing-masing pengkoding melakukan pencatatan yang sama dengan batasan yang sama pula. Makin tinggi kesamaan hasil pengkodingan, makin *reliable* data tersebut.

Proses uji reliabilitas dilakukan oleh peneliti dengan membandingkan antara jawaban yang diisi peneliti dalam *coding sheet* dengan jawaban pengkoding lainnya.

Dalam penelitian ini menggunakan rumus yang digunakan untuk menguji koefisien reliabilitas. Ambang penerimaan koefisien reliabilitas menurut Kriyantono adalah 60%. Jika tidak sampai 60% maka definisi operasional dalam *coding sheet* perlu dibuat lebih spesifik. Berikut rumusan hitung uji reliabilitas dari Ole R. Holsti (Kriyantono, 2006: 236-237):

$$CR = \frac{2M}{N1 + N2}$$

Keterangan

CR : *Coefisien Reliabilitas*

M : Jumlah pernyataan yang disetujui oleh kedua pengkoding (hakim) dan periset

N1/N2 : Jumlah pertanyaan yang diberi kode oleh kedua pengkoding (hakim) dan periset

4. Analisa Data

Pada penelitian ini setiap unit analisisnya dicatat dalam tabel yang disusun berdasarkan frekuensi atau disebut distribusi frekuensi. Distribusi frekuensi ini dilakukan menggunakan tabulasi silang.

Tabel silang dapat digunakan untuk mengoreksi hubungan yang tidak masuk akal. Tabel ini dapat dibuat untuk hubungan antarvariabel-terpengaruh, antarvariabel-pengaruh atau antarvariabel pengaruh dan terpengaruh (Singarimbun dan Effendi, 1995: 256).

Dalam analisa tabulasi silang, peneliti menggunakan distribusi presentase pada sel-sel dalam tabel sebagai dasar untuk menyimpulkan hubungan antara variabel- variabel penelitian. Variabel terpengaruh disusun sebagai garis (vertikal) sedangkan variabel terpengaruh disusun dalam kolom (horisontal) (Singarimbun dan Effendi, 1995: 273-274).

Peneliti memindahkan informasi yang didapat dari *coding sheet* ke dalam tabel silang yang berisi frekuensi data berupa presentase sebagai dasar untuk menyimpulkan hubungan antar variabel. Kemudian peneliti mendeskripsikan hasil dari perhitungan dalam tabel distribusi frekuensi untuk menjelaskan imparzialità media dalam penelitian ini yakni pemberitaan mengenai kerusakan di Temanggung 2011 di surat kabar harian *Kompas*.